

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dekade delapanpuluhan, pembangunan kepariwisataan di Tanah Air benar-benar mendapat perhatian dengan harapan dapat menjadikannya sebagai salah satu sumber penting bagi pemasukan devisa negara. Harapan itu muncul setelah terjadinya resesi perekonomian dunia di tahun-tahun tujuhpuluhan, sehingga berpengaruh pada merosotnya penerimaan devisa negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas), tulang punggung biaya pembangunan waktu itu; sedangkan ekspor non-migas masih sulit serta adanya kebijaksanaan penghematan ekspor kayu untuk menjaga kelestarian alam (Oka A. Yoeti, 1985, h. 48).

Kepariwisataan di Indonesia kini memang sedang tumbuh, berkembang, bahkan telah memberi buah berupa pemasukan devisa itu tadi. Menurut pemberitaan Kompas (30 Mei 1989), dalam tahun 1988 yang lalu negara telah memperoleh devisa sebesar US\$ 1.027 juta dari 1.301.347 wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya, yakni pada tahun 1987, negara menerima sebesar US\$ 837 juta dari 1.076.347 wisatawan. Di samping itu tentu juga telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pada masing-masing daerah tujuan wisata. Keadaan ini menjadikan kedudukan kepariwisataan semakin mantap sebagai sektor pembangunan yang perlu dikembangkan. GBHN (1988) secara tegas menyatakan :

Pembangunan kepariwisataan dilanjutkan dan ditingkatkan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan nasional menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat, mendorong pembangunan daerah serta memperkenalkan alam, nilai dan budaya.

Kalau tadinya Indonesia hanya memiliki beberapa daerah tujuan wisata dengan menggunakan Pulau Bali sebagai daya tarik utama untuk datang berkunjung ke Indonesia, kini Pemerintah mengembangkannya menjadi tujuhbelas daerah tujuan wisata, yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, DI Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur, dan Maluku (Soesilo Soedarman, 1989, h. 4 - 5).

Salah satu misi penting yang perlu digarisbawahi dari kepariwisataan adalah untuk memperluas kesempatan kerja, sebagaimana dinyatakan dalam GBHN (1988) di atas. Kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang muncul sebagai isu nasional sejak awal Pelita IV (Soeharsono Sagar, 1982, h. 258). Kesempatan kerja dan hidup layak adalah hak dasar atau kebutuhan dasar manusia Indonesia (human basic need) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 27 ayat 2 : "Tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan"). Pemenuhan kebutuhan pokok yang minimal untuk pangan, sandang, papan, dan pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, elektrifikasi dan transport) tidak mungkin dapat dijangkau oleh

masyarakat tanpa jaminan adanya lapangan kerja yang tersedia.

Isyu di atas muncul terutama setelah suasana pembangunan di satu pihak dihadapkan pada kenyataan bahwa belum adanya pemerataan pendapatan (redistribution of income) di kalangan masyarakat, walaupun dalam Pelita I dan II Pemerintah berhasil menaikkan angka laju pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup tinggi; bahkan telah semakin memperbesar jurang pemisah antara kelompok kaya dengan yang miskin, seperti yang ditunjukkan oleh data di bawah ini :

- 1). Kelompok berpenghasilan rendah, menerima pendapatan per-kapita : US\$ 124,3 atau Rp. 77.770,-
 - 2). Kelompok berpenghasilan menengah, menerima pendapatan per-kapita : US\$ 358,2 atau Rp. 224.000,-
 - 3). Kelompok berpenghasilan tinggi, yang meliputi 20 pCt dari populasi penduduk Indonesia, menerima pendapatan per-kapita : US\$ 1.265,9 atau Rp. 792.000,-
- Dari angka-angka pendapatan per-kapita kelompok penduduk tersebut jelaslah kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa 80 pCt dari penduduk Indonesia masih hidup pada tingkat rata-rata jauh di bawah pendapatan per-kapita nasional tahun 1981 (US\$ 446) (Soeharsono Sagir, 1982, h. 34).

Pada tahun 1985, keadaan tersebut belum banyak berubah, seperti yang dikemukakan oleh Sarlito Wirawan Sarwono (1986, h. 39) berikut :

GNP untuk tahun 1985 diperkirakan US\$ 530/tahun, hal mana menyebabkan Indonesia digolongkan dalam negara berpenghasilan menengah. Tetapi penyebaran pendapatan sangat pincang, 40% penduduk termiskin hanya menerima 6,6% dari GNP, sedangkan 20% penduduk golongan atas menerima 49,4%. Ini berarti bahwa kesenjangan penerimaan antara golongan yang paling miskin dan golongan yang paling kaya sangat besar (165 : 2470). Akibat dari kondisi seperti ini adalah kepincangan sosial yang bisa kita lihat di mana-mana.

Tuntutan di pihak lain terhadap pentingnya perlu-

asan kesempatan kerja tersebut adalah kenyataan pertumbuhan angkatan kerja yang terus menaik seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, sedangkan kesempatan kerja yang tersedia tidaklah memadai. Data menunjukkan jumlah angkatan kerja pada awal Pelita I (1969/1970) sebanyak 44.736.000 dari seluruh penduduk sebanyak 118.054.000 jiwa, berkembang menjadi 81.200.000 orang dalam tahun pertama Pelita V (1989/1990) dari keseluruhan penduduk 181.620.000 jiwa; padahal kesempatan kerja yang tersedia sampai dengan akhir tahun Pelita IV (1988/1989) hanyalah untuk 70.066.000 orang (Soeharsono Sagir, 1982, h. 157 dan 165). Dengan itu berarti dalam memasuki Pelita V ini, kesempatan kerja yang harus dipersiapkan adalah sebanyak untuk 11.134.000 orang. Jumlah ini tidak terlalu jauh berbeda dari data angkatan kerja yang ditunjukkan oleh Departemen Tenaga Kerja, yaitu sebesar 11.086.000 orang (A. Mintorogo, 1989, h. 34).

Keberhasilan upaya perluasan kesempatan kerja dalam rangka pemerataan pendapatan (hasil-hasil pembangunan), akan banyak bergantung pada kualitas manusianya sebagai perencana dan pelaksana. Sumber alam potensial dapat menjadi kekuatan riil sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Namun, bertalian dengan ini ternyata :

Sumber daya manusia cukup besar jumlahnya, pada saat ini merupakan potensi yang masih merupakan beban pembangunan, belum mampu menjadi modal dasar untuk sarana pembangunan, disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitasnya, baik oleh karena rendahnya latar belakang pendidikan, ketrampilan dan keahlian, maupun sebagai akibat rendahnya tingkat gizi masyarakatnya; sehingga kita masih tetap dihadapkan kepada perangkap keterbelakangan atau lingkaran kemiskinan (Soeharsono Sagir, 1982, h. 323).

Demikian pula halnya, perluasan kesempatan kerja melalui pembangunan kepariwisataan di Tanah Air, kendala serupa akan ditemuinya. Persaingan di dalam memperoleh lapangan kerja tak dapat dihindari (termasuk dalam lapangan kepariwisataan), dan "hanya mereka yang mempunyai ketrampilan akan lebih dahulu dapat mengisi lowongan kerja yang ada (A. Mintorogo, 1989, h. 34). Di sinilah letak tanggung-jawab yang harus dipikul oleh pendidikan, termasuk PLS.

Banyak hal yang tak terjangkau oleh pendidikan formal merupakan bagian yang ditangani oleh PLS, bahkan PLS tidak sekedar berperan sebagai pelengkap atau penyempurna dari kelemahan sistem pendidikan formal, tetapi pada saat-saat tertentu dapat menjadi penggantinya (M. Sardjan Kediri, 1982, h. 34). Hal seperti ini sesungguhnya telah ditunjukkannya dalam memberhasilkan kepariwisataan, misalnya dengan adanya kursus-kursus bahasa asing untuk guide (pramuwisata), kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan rasa sadar wisata, studi komparatif ke beberapa daerah tujuan wisata lain yang lebih maju, dan penyelenggaraan berbagai kursus ketrampilan untuk masyarakat di sekitar obyek wisata, baik yang diselenggarakan oleh Departemen Perindustrian maupun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan program pendidikan masyarakatnya, atau dari Departemen lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis memilih salah satu daerah tujuan wisata yang relatif baru berkembang (seperti yang telah diungkapkan pada halaman 2), yaitu Pulau Lombok, Provinsi NTB. Pulau Lombok adalah satu dari dua pu-

lau besar yang menjadi wilayah Provinsi NTB. Pulau besar lainnya ialah Sumbawa. Pulau Lombok memiliki luas 4.738,70 km² yang di sebelah timur dibatasi oleh Selat Alas, sebelah barat : Selat Lombok, sebelah utara : Laut Jawa, dan sebelah selatan : Samudera Hindia (Kantor Statistik Provinsi NTB, 1981, h. 1). Pulau ini mempunyai keindahan alam dan budaya yang potensial untuk dapat dijadikan obyek atau atraksi wisata, seperti yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1
Daftar Obyek Wisata Alam dan Budaya di Pulau Lombok

Kabupaten	Nama Obyek	Lokasi	Jenis	
			Alam	Budaya
1	2	3	4	5
<u>Lombok Barat</u>	-Mayura	Cakranegara	-	Budaya
	-Pura Miru	Cakranegara	-	Budaya/ sejarah
	-Taman Narmada	Narmada	-	Budaya/ sejarah
	-Museum NTB	Mataram	-	Budaya
	-Makam Jenderal Van Ham	Karang Jangkong	-	Sejarah
	-Pura Agung Gunung Sari	Desa Gunung Sari	-	Budaya
	-Gunung Pengsong	Kec. Gerung	Alam	Budaya
	-Suranadi	Kec. Narmada	Alam	Budaya
	-Batu Bolong	Desa Batu Lanyar	Alam	Budaya
	-Pantai Senggigi	Desa Batu Lanyar	Alam	-
	-Pantai Sira	Desa Pemang Barat	Alam	-
	-Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan	Desa Pemang Barat	Alam	-

1	2	3	4	5
	-Taman Lingsar	Desa Lingsar	-	Budaya
	-Sesaot	Desa Sesaot	Alam	-
<u>Lombok Tengah</u>	-Tenunan Tradisional	Desa Sukarara	-	Budaya
	-Desa Tradisional Sasak	Desa Sengkolan dan Desa Rambitan Dusun Sade	-	Budaya
	-Makam Pejanggik	Praya	-	Budaya / sejarah
	-Kerajinan tangan dari tanah liat	Desa Bleka	Alam	Budaya
	-Hutan Wisata Aik Bukak	Desa Aik Bukak	Alam	-
	-Pantai Putri Nyale / Pantai Kuta, Pantai Tanjung Aan	Desa Kuta dan Desa Sengkol	Alam	-
	-Pantai Selong Blanak	Kec. Praya Barat	Alam	-
	-Pantai Grupuk	Desa Sengkol	Alam	-
<u>Lombok Timur</u>	-Anyam-anyaman	Desa Suradadi	-	Budaya
	-Tenunan tradisional	Desa Pringgasela	-	Budaya
	-Anyam-anyaman	Desa Kuta Raja / Loyok	-	Budaya
	-Tete Batu	Desa Tete Batu	Alam	-
	-Timba Nuh	Desa Fengandangan	Alam	-
	-Iemor (peristirahatan)	Desa Swela	Alam	-
	-Pancor Korpang (air terjun)	Desa Pringgasela	Alam	-
	-Pantai Labuhan Haji	Desa Labuhan Haji	Alam	-
	-Labuhan Lombok	Desa Labuhan Lombok	Alam	-

1	2	3	4	5
	-Gili Lampu	Desa Sambelia	Alam	-
	-Otak Kokok Geding	Desa Kokok Geding	Alam	-
	-Sembalun Lawang dan Bumbung	Desa Sembalun	Alam	-
	-Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak	Desa Sembalun	Alam	-

Sumber : Diparda Provinsi NTB, 1989, h. 39 - 40

Untuk pengembangan, oleh Pemerintah Daerah setempat, tujuan wisata Pulau Lombok dibagi ke dalam tiga lingkungan pengembangan, yaitu : (1) Lombok Barat berpusat di Mataram, (2) Lombok Tengah berpusat di Praya, dan (3) Lombok Timur berpusat di Selong (Diparda Propinsi NTB, 1982, h. 2).

Selanjutnya Diparda Provinsi NTB menjelaskan sebagaimana termuat dalam Suara Karya (24 Agustus 1988) bahwa ketiga lingkungan pengembangan tersebut kemudian dibagi lagi ke dalam simpul-simpul pengembangan. Lingkungan pengembangan wisata Lombok Barat terdiri dari simpul-simpul : (1) Batu Layar, (2) Batu Bolong, (3) Pantai Senggigi, (4) Teluk Kodeq, (5) Pantai Sira, dan (6) Gugusan kepulauan Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. Lombok Tengah memiliki simpul pengembangan Putri Nyale/Pantai Kuta dan Selong Belanak dengan stop over di Desa Tradisional Sasak Rambitan. Simpul ini terdiri dari : (1) Pantai Selong Belanak, (2) Pantai Kuta, (3) Pantai Seger, (4) Pantai Bu-

nut, (5) Pantai Grupuk, dan (6) Pantai Tanjung Aan. Sedangkan Lombok Timur tidak memiliki simpul pengembangan pantai, melainkan hanya mempunyai simpul pengembangan wisata Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak yang khususnya ditujukan untuk hiking, pendakian, perkemahan, dan penelitian ilmiah tentang fauna dan flora yang berada pada garis pemisah yang dibuat oleh Wallace.

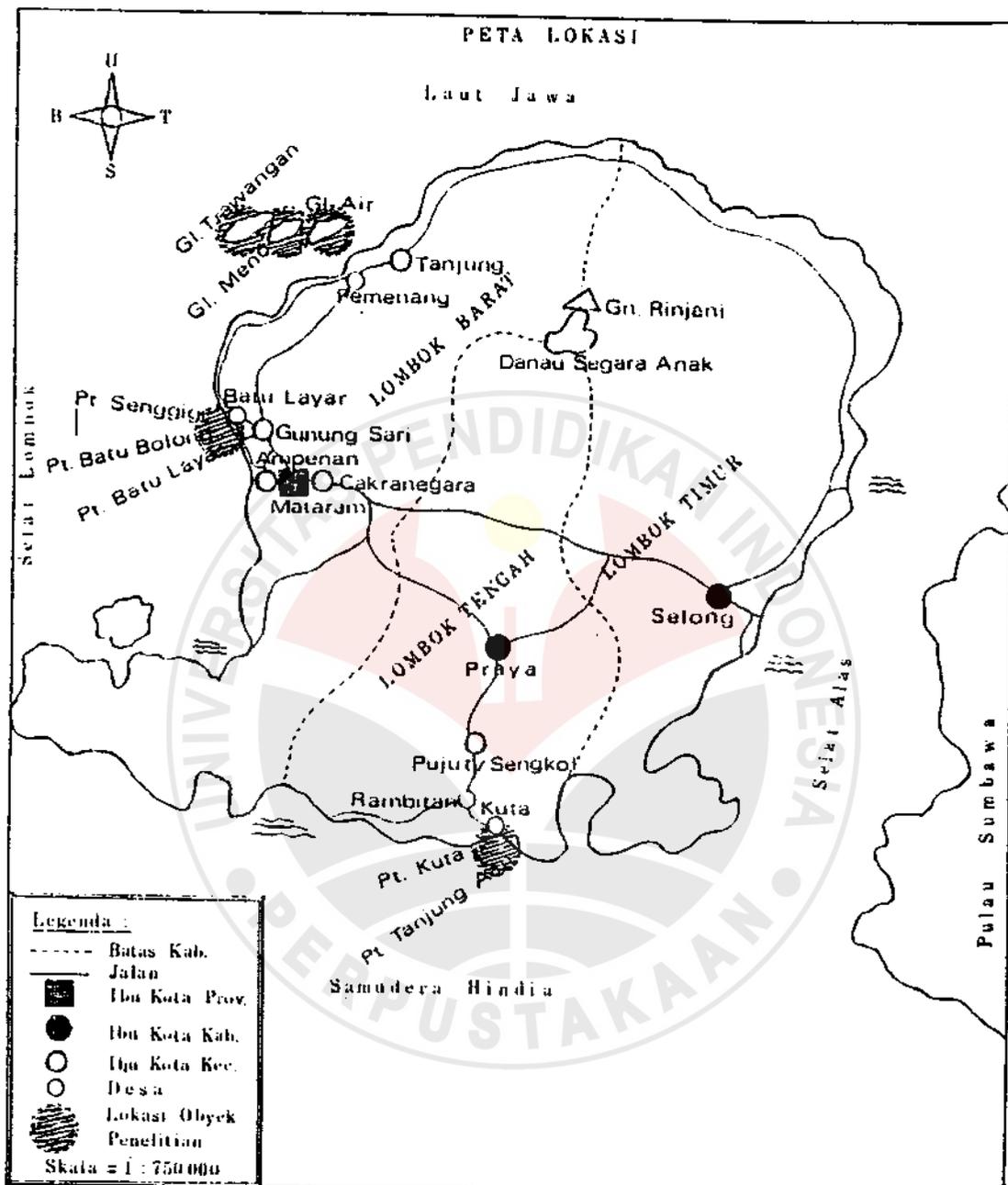
Dari kesemua simpul pengembangan wisata di atas, ternyata simpul-simpul atau obyek-obyek wisata pantai sa-
jalah yang banyak mengalami perkembangan. Hal ini terbukti dengan banyak berdirinya berbagai bangunan sarana/prasara-
na pariwisata seperti hotel, bungalow, home stay, restau-
ran, dan fasilitas lainnya di tempat-tempat tersebut. Dari kesemua obyek wisata pantai itu pun tidak seluruhnya ber-
kembang (hasil studi pendahuluan penulis pada tanggal 5 -
15 September 1989). Tepatnya obyek-obyek wisata pantai yang benar-benar dapat tergolong telah berkembang adalah Pantai Batu Layar, Pantai Batu Bolong, Pantai Senggigi (yang ketiganya berada dalam wilayah Desa Batu Layar Keca-
matan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat), Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan (yang terletak dalam wilayah De-
sa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Ba-
rat), serta Pantai Kuta dan Pantai Tanjung Aan (kedua pan-
tai terakhir ini terletak dalam wilayah Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, di mana Pantai Kuta adalah termas-
uk wilayah Desa Kuta, sedang Pantai Tanjung Aan terletak dalam wilayah Desa Sengkol). Adapun obyek-obyek wisata pan-
tai lainnya masih nampak biasa-biasa saja/belum berkembang.

Sebagai daerah tujuan wisata yang relatif baru, khususnya terhadap masyarakat yang berada di sekitar obyek-obyek wisata pantai yang tergolong sudah berkembang seperti disebutkan di atas, dapat menjadi sasaran yang menarik untuk diteliti, misalnya tentang respons atau persepsi mereka terhadap pengembangan pariwisata, dampak pengembangan pariwisata terhadap tingkat pendapatan masyarakat, atau yang lainnya.

Dalam penelitian ini, rasanya penulis tidak keliru jika menjatuhkan pilihan untuk meneliti tentang bagaimana sebenarnya respons masyarakat terhadap pariwisata, terutama terhadap pengembangan obyek wisata pantai yang terjadi di sekitarnya? Obyek penelitian tentu ditujukan kepada anggota masyarakat yang berada/berhadapan langsung dengan obyek-obyek wisata pantai yang tergolong sudah berkembang tadi; yaitu anggota masyarakat yang berada di sekitar Pantai Batu Layar, Pantai Batu Bolong, Pantai Senggigi, Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan (di Kabupaten Lombok Barat), serta Pantai Kuta dan Pantai Tanjung Aan (di Kabupaten Lombok Tengah).

Untuk lebih jelasnya, letak/lokasi obyek penelitian sebagaimana dimaksudkan adalah seperti yang nampak dalam gambar/peta berikut ini :

Gambar 1



Sumber : Bappeda Tk. I NTB & UNDP, 1985, h. 16 dengan modifikasi oleh Hambali RLK

Pilihan topik penelitian tentang respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai ini menjadi semakin menarik, manakala kita melihat latar belakang penduduk setempat yang masih teguh berpegang pada adat-istiadat/budaya dan agamanya, sementara periwisata datang dengan

menawarkan banyak hal-hal baru yang kadang-kadang bertentangan dengan kebiasaan dan nilai budaya masyarakat. Di segi lain, pariwisata memang cukup memberikan kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan kerja atau berusaha.

Sekedar gambaran umum mengenai perkembangan kepariwisataan di Pulau Lombok dan respons masyarakatnya dapat dikemukakan sebagai berikut : menurut Dinas Pariwisata Provinsi NTB (sebagaimana diberitakan Suara Karya, 24 Agustus 1988), bahwa pariwisata sebagai suatu industri di Pulau Lombok baru mulai digiatkan pada awal dekade 1980-an. Sejak awal dekade ini lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara dapat dikatakan cukup tinggi, karena rata-rata melebihi angka proyeksi pada setiap tahunnya seperti nampak dalam data ini : dalam tahun 1982 angka proyeksi 3.307 orang, realitanya 4.743 orang; dalam tahun 1987 angka proyeksi 4.795 orang, realitanya 25.714 orang; dan dalam tahun 1988 angka proyeksi 6.000 orang, realitanya mencapai 44.846 orang.

Seiring dengan itu fasilitas penunjang pun berkembang. Hotel dan losmen yang pada tahun 1980 hanya 44 buah dengan 724 kamar, dalam tahun 1987 menjadi 92 buah (9 di antaranya adalah hotel berbintang) dengan 1.291 kamar. Demikian pula halnya dengan biro perjalanan yang dari 5 buah pada tahun 1980 menjadi 16 buah dalam tahun 1987. Restoran/rumah makan dari 44 buah pada tahun 1980 menjadi 87 buah dalam tahun 1987. Toko cendramata dari 4 buah pada tahun 1980 berkembang menjadi 13 buah dalam tahun 1987.

Pemandu wisata (dengan bahasa Inggris) dalam tahun 1987 sebanyak 113 orang dan usaha taxi sebanyak 30 buah. Pinjaman masyarakat di BRI Cabang Mataram menurut Pimpnannya untuk sektor perdagangan, restoran dan perhotelan sudah mencapai Rp. 50.713 juta dalam tahun 1987 dari jumlah Rp. 20.370 juta pada tahun 1980.

Sementara itu, dalam tahun terakhir ini jalan-jalan menuju obyek wisata pantai nampak terus diperlebar, dan pada bulan Desember 1989 telah mulai dioperasikan dua buah hotel berbintang tiga di kawasan Pantai Senggigi dengan menyediakan fasilitas kamar sebanyak 102 buah (Kompas, 18 Desember 1989). Arus kedatangan wisatawan mancanegara pun terus meningkat. Menurut Menparpostel, Soesilo Soedarman, pada akhir tahun 1989 yang baru lalu, Pulau Lombok (NTB) berada di urutan ketiga di Indonesia dalam hal jumlah penerimaan kedatangan wisatawan mancanegara (Kompas, 30 Januari 1990).

Data perkembangan di atas sekaligus telah menunjukkan respons masyarakat setempat, sebab perkembangan/kemajuan yang telah dicapai tersebut tak lepas dari keterlibatan mereka. Dari hasil penelitian pendahuluan penulis (5 - 15 September 1989), juga menunjukkan bahwa kehadiran pengembangan obyek wisata pantai memang telah memberikan kesempatan/lapangan kerja bagi sebagian anggota masyarakat di sekelilingnya. Misalnya di bidang usaha, sesuai dengan kemampuan masing-masing, ada yang membuat rumah pondokan (home stay), bungalow, rumah makan, dan kios cendra-

mata; ada pula yang menyewakan perahu, berdagang buah-buahan, dan menjadi pedagang asongan. Namun masih banyak juga yang tetap bertahan dengan pekerjaan semula berdasarkan alasan masing-masing. Keadaan seperti ini dapat dilihat, baik di kawasan Senggigi maupun Gili Air, Kuta dan Aan. Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan, memberikan gambaran bahwa masyarakat di sekitar obyek tersebut cukup bergembira atas kehadiran pengembangan obyek wisata pantai ini, yakni kalau dilihat dari sudut dampaknya secara ekonomi (karena dapat memperluas kesempatan kerja dan berusaha); tetapi mereka, kaum tua khususnya, dibayangi oleh kekhawatiran atas pengaruh buruk bagi anak dan cucu mereka berasal dari budaya asing yang dibawa oleh para wisatawan mancanegara.

Dari sedikit gambaran di atas dapat dilihat bahwa masyarakat di Pulau Lombok umumnya, dan mereka yang berhadapan langsung dengan obyek-obyek wisata pantai yang tergolong telah berkembang khususnya, menunjukkan bentuk respons yang berbeda-beda; ada yang nampaknya sudah dapat menerima, ada yang masih ragu-ragu, dan bahkan mungkin di balik itu semua ada yang menolak. Dipandang dari sudut pengembangan, maka apa yang disimpulkan terakhir ini merupakan indikator bahwa pada respons masyarakat dimaksud memang mengandung permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Kecuali itu, hal yang dikemukakan di atas baru merupakan sebagian kecil saja dari data/informasi lapangan. Karenanya masih banyak data yang belum terungkap, sehingga ini merupakan peluang yang baik untuk diteliti.

B. Pentingnya Masalah

Penelitian ini memang secara sengaja didisain untuk mengungkap lebih banyak tentang respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai di Pulau Lombok, NTB. Pentingnya masalah respons masyarakat sebagai suatu topik penelitian dalam kesempatan ini dapat dilihat dari dua dimensi. Pertama, secara teoritis hasil penelitian ini nanti akan dapat memberikan kontribusi bagi PLS dalam hal pengayaan teori yang telah teruji, untuk kemudian dapat dijadikan pedoman/pegangan di dalam melaksanakan tugas kemanusiaannya di lapangan. Namun juga sebaliknya, PLS dapat berperan aktif, dalam arti bahwa PLS bisa memberikan pandangan-pandangannya, misalnya (sehubungan dengan penelitian ini) tentang upaya yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan pengembangan kepariwisataan di daerah tujuan wisata Pulau Lombok, NTB. Dengan demikian dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjembatani antara harapan yang terkandung pada misi kepariwisataan di satu pihak dengan realisasinya dalam kenyataan kehidupan masyarakat di pihak lain.

Kedua, secara praktis hasil penelitian ini dapat merupakan informasi ilmiah yang bisa dijadikan masukan yang sangat berarti, terutama bagi para policy maker atau pelaksana dalam pengembangan kepariwisataan di daerah penelitian. Dalam menunjang program sadar wisata misalnya yang sekarang sedang digiatkan, maka pengetahuan tentang bagaimanakah sesungguhnya respons masyarakat terhadap

pengembangan kepariwisataan (khususnya dalam hal pengembangan obyek wisata pantai) adalah suatu informasi yang fundamental sekali sifatnya, sebab dari padanya akan diperoleh petunjuk tentang kemungkinan-kemungkinan langkah yang sebaiknya ditempuh. Lebih jauh dari itu, hasil penelitian ini akan dapat memberi inspirasi bagi penyusunan program atau kegiatan dalam mengembangkan kepariwisataan pada masa-masa yang akan datang. Dengan itu, pembangunan kepariwisataan di berbagai daerah benar-benar dapat membawa berkah bagi negara dan masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah, secara makro dalam penelitian ini berangkat dari kehendak pembangunan yang terus-menerus mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat, antara lain dengan pemeratakan hasil-hasil pembangunan melalui perluasan kesempatan atau lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengembangkan kepariwisataan di Tanah Air, yang juga bertujuan untuk meningkatkan devisa negara, membantu pembangunan daerah, dan memperkenalkan alam dan budaya. Akan tetapi karena pemegang kunci keberhasilannya terletak di tangan-tangan manusia sebagai pengelola dan pelaksanaannya, dengan kondisi di satu pihak diwarnai oleh produktivitas yang rendah, karena tingkat pendidikan dan ketrampilan yang juga rendah; sementara di pihak lain, angka pencari kerja terus membesar. Hal ini mengundang berbagai sektor untuk menanganinya, terutama sekali sektor

pendidikan (yang justeru adalah telah menjadi tugasnya untuk menyiapkan manusia-manusia pembangunan), termasuk PLS. Dalam menunjang keberhasilan pengembangan kepariwisataan, di mana masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting, maka berkenaan dengan inilah peran PLS tak bisa diremehkan.

Secara mikro, penelitian ini memusatkan perhatiannya di seputar respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai di Pulau Lombok, NTB yang sebagaimana gambaran terdahulu nampak menunjukkan bentuk yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang menjadi pusat/inti permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengapa terjadi perbedaan respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai di Pulau Lombok ? Atau dengan kata lain, faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan respons itu ?

Sehubungan dengan itu, banyak faktor yang dapat diduga menjadi penyebabnya, seperti misalnya secara internal dapat disebutkan : umur, pendidikan, status sosial ekonomi, sikap terhadap perubahan, motif berprestasi, atau yang lainnya; dan secara eksternal dapat berupa : nilai budaya, kondisi alam, kebijakan pemerintah daerah setempat, dan atau modal yang dimiliki.

Akan tetapi dengan keterbatasan yang ada, baik dalam hal dana maupun waktu serta tenaga; maka dalam kesempatan ini cukup dipilih beberapa faktor saja yang diduga mempunyai pengaruh yang cukup besar, yaitu : (1) status sosial ekonomi, (2) nilai budaya, (3) umur, (4) pendi-

dikan, dan (5) pola hubungan sosial dari masyarakatnya.

Faktor-faktor di atas dipilih adalah semata-mata karena faktor-faktor tersebut diduga mampu menjelaskan masalah yang diteliti, dan jelas tidak sekali-kali karena dianggap mampu untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh.

Berdasarkan pusat/inti permasalahan dan beberapa faktor yang diduga memberikan pengaruh kepadanya di atas, maka berikut ini lebih dapat dipertegas lagi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sejauhmanakah perbedaan respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai di Pulau Lombok ?
2. Apakah status sosial ekonomi mempengaruhi perbedaan respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai di Pulau Lombok ?
3. Apakah nilai budaya mempengaruhi perbedaan respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai di Pulau Lombok ?
4. Apakah umur mempengaruhi perbedaan respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai di Pulau Lombok ?
5. Apakah pendidikan mempengaruhi perbedaan respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai di Pulau Lombok ?
6. Apakah pola hubungan sosial mempengaruhi perbedaan respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai di Pulau Lombok ?

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mengungkap atau menjawab masalah-masalah di atas. Selanjutnya berikut ini akan diberikan penjelasan secara sekilas tentang ke-enam faktor tersebut :

1. Respons Masyarakat terhadap Pengembangan Obyek Wisata Pantai (RMPOWP) di Pulau Lombok

Setiap orang memberikan respons (sambutan/reaksi) terhadap stimulus yang datang pada dirinya. Respons selalu berkaitan dengan stimulus, sehingga jika tak ada stimulus tak akan ada respons. Munn dan Mifflin (1962, h. 38) berkenaan dengan ini menyatakan bahwa respons adalah "any activity that is known to dependent upon the stimulus". Sedangkan stimulus menurut keduanya adalah "the antecedent event, that which initiates an activity". Misalnya jika tiba-tiba turun hujan, orang segera merespons, baik dengan menepi mencari perlindungan atau mungkin mengembangkan payung yang dibawanya dan terus berjalan mencapai tujuannya. Ini salah satu contoh dari bentuk respons yang tergolong nyata. Contoh respons nyata lainnya adalah gerakan-gerakan otot bayi yang baru lahir ketika berhadapan dengan lingkungannya yang baru (Kessen et. al., 1970, h. 68).

Namun tidak semua respons berwujud nyata seperti yang ditunjukkan di atas. Respons dapat pula tak nyata. Perasaan senang atau tidak senang (misalnya setelah mendengar suara letusan meriam) adalah merupakan contoh bentuk respons tak nyata (Zuhairini, 1980, h. 71). Pandangan ini dibenarkan oleh pernyataan Munn dan Mifflin (1962, h. 39) yang berbunyi :

Many responses are clearly observable without the use of instruments. These are referred to as gross behavior, or as explicit or overt. They may also be referred to as verbal or non-verbal. Some responses are internal. These are, so to speak "covered" hence we refer to them as covert. They are also said to be implicit.

Obyek-obyek wisata pantai di Pulau Lombok baru mulai dikembangkan pada awal tahun delapanpuluhan. Sebelumnya pantai-pantai tersebut masih nampak natural. Dari usaha pengembangan yang terus dilakukan, baru pada tahun 1987 Pulau Lombok berhasil muncul sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang tak kalah menariknya untuk dikunjungi wisatawan mancanegara, yakni dengan ditandai oleh diresmikannya pengoperasian Senggigi Beach Hotel yang berbintang tiga pada bulan April 1987 (Diparda Tingkat I, 1989, h. 23).

Sejak itulah kawasan Pantai Senggigi yang juga meliputi Pantai Batu Layar dan Batu Bolong benar-benar telah berubah. Keadaan ini kemudian diikuti oleh kawasan Pantai Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan yang menjadi lebih terkenal dengan karang birunya; serta oleh kawasan Pantai Kuta dan Tanjung Aan. (Lokasinya dapat dilihat kembali pada peta, h. 11).

Pengembangan obyek wisata pantai tersebut secara disadari atau tidak, telah membentuk semacam lingkungan atau situasi baru bagi masyarakat sekitarnya; dan tentu mengundang berbagai respons mereka. Hal ini adalah karena setidak-tidaknya lingkungan/situasi baru tersebut berisikan empat komponen, yaitu : (1) pembangunan sarana/prasarana pariwisata seperti hotel, restoran, bungalow, home stay, kios cenderamata, jalan, atau fasilitas lainnya;

(2) penyelenggaraan atraksi wisata pantai seperti berenang, berperahu, menyelam (menikmati keindahan taman laut), pe-
mentasan kesenian daerah, atau lainnya; (3) peningkatan
jumlah wisatawan yang datang berkunjung, baik wisatawan
mancanegara maupun nusantara; dan (4) penjagaan dan peles-
tarian lingkungan alam obyek wisata pantai tersebut, baik
yang di daratan seperti pepohonan-pepohonan yang ada mau-
pun yang di laut seperti karang-karang laut atau taman la-
utnya.

Masyarakat akan merespons lingkungan/situasi baru
yang memiliki ke-empat komponen di atas adalah menurut ke-
adaan dan latar belakang masing-masing, sehingga kemungkin-
an besar akan terjadi perbedaan bentuk respons antara satu
dengan lainnya. Sejauhmana perbedaan respons masyarakat
ini dalam kesempatan penelitian ini akan dilihat hubungannya
dengan status sosial ekonomi, nilai budaya, umur, pen-
didikan, dan pola hubungan sosial masyarakatnya. Karena
itu pula RMPWP di sini berkedudukan sebagai variabel de-
penden.

Guna memudahkan pengukurannya, maka RMPWP perlu
terlebih dahulu disusun rumusan operasionalnya. Untuk mak-
sud ini penulis mendekatinya dengan mengajukan beberapa
pertanyaan pembantu sebagai berikut :

1). Dengan adanya lingkungan baru sebagai akibat
dari pengembangan obyek wisata pantai itu, apa yang dila-
kukan masyarakat di sekitarnya secara ekonomi ? -->(pe-
kerjaan)

2). Apakah mereka sebagai tuan rumah telah memperlakukan para wisatawan yang datang berkunjung dengan baik ? --> (perlakuan terhadap wisatawan)

3). Apakah mereka kemudian terdorong untuk mengembangkan kesenian daerah yang mereka miliki untuk dipentaskan di hadapan wisatawan ? --> (keikutsertaan dalam mengembangkan kesenian daerah)

4). Apakah mereka juga turut-serta terlibat di dalam memelihara kelestarian alam di lingkungan obyek wisata pantai tersebut ? --> (keterlibatan dalam pelestarian lingkungan alam), dan

5). Sesungguhnya bagaimanakah sikap mereka (setuju atau tidak) terhadap lingkungan barunya itu ? --> (sikap masyarakat)

Dari kelima pertanyaan pembantu tersebut, minimal terdapat lima komponen dalam maksud untuk meneliti tentang RMPWP di Pulau Lombok. Kelimanya ialah : yang bersifat overt terdiri dari (1) pekerjaan, (2) perlakuan terhadap wisatawan, (3) keikutsertaan dalam mengembangkan kesenian daerah, (4) keterlibatan dalam pelestarian lingkungan alam di sekitar obyek, dan yang bersifat covert adalah (5) sikap masyarakat itu sendiri.

Dengan kelima komponen di atas, berikut dapat disusun rumusan operasional RMPWP dalam penelitian ini, yakni : suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat meliputi pekerjaan, perlakuan terhadap wisatawan, keikutsertaan dalam mengembangkan kesenian daerah, keter-

libatan dalam pelestarian lingkungan alam di sekitar obyek, dan sikap mereka yang timbul sebagai akibat dari adanya pembangunan sarana/prasarana pariwisata (seperti hotel, restoran, bungalow, jalan, dan lain sebagainya), penyelenggaraan berbagai atraksi wisata pantai (seperti berenang, menyelam atau berperahu) dan pertunjukan kesenian daerah, peningkatan jumlah wisatawan yang datang berkunjung, serta adanya upaya pelestarian alam di lingkungan obyek wisata pantai tersebut.

Berdasarkan rumusan operasional di atas, pengukuran RMPOWP dalam penelitian ini akan dilihat dari kelima komponen/aspek yang membentuknya sebagaimana telah disebutkan. Kelimanya juga sekaligus merupakan sub-variabel dependen yang akan dilihat hubungannya dengan status sosial ekonomi, nilai budaya, umur, pendidikan, dan pola hubungan sosial masyarakatnya.

2. Status Sosial Ekonomi (SSE)

Walaupun secara teoritis semua manusia sederajat, dalam kenyataannya setiap masyarakat selalu memiliki struktur yang terdiri dari strata atau pelapisan-pelapisan sosial. Bertalian dengan pelapisan-pelapisan sosial ini, Sudardja Adiwikarta (1988, h. 48) menyatakan : "Ada kecenderungan bahwa antara orang-orang dari strata sosial yang sama terjadi pergaulan yang lebih erat dan intensif dibandingkan dengan antara orang-orang yang berasal dari strata yang berlainan". Akibatnya terbentuklah perilaku yang berbeda-beda pada masing-masing pelapisan sosial ter-

sebut. Perilaku atau gaya hidup masyarakat kelas atas berbeda dengan gaya hidup masyarakat kelas menengah atau bawah. Hal ini dibenarkan oleh Krech (1972, h. 313), karena adanya perbedaan pada latar belakang lingkungan sosial di mana mereka masing-masing hidup.

Salah satu cara untuk mengetahui posisi seseorang di dalam pelapisan-pelapisan sosial tadi adalah dengan melihat status sosial ekonominya. Dikaitkan dengan penjelasan di atas, maka jika setiap pelapisan sosial mempunyai gaya hidup sendiri-sendiri, itu berarti tingkat status sosial ekonomi seseorang mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku atau kegiatan yang dilakukannya. Atau dalam penelitian ini, adalah terhadap bentuk respons yang diberikannya.

Untuk menentukan tingkat status sosial ekonomi seseorang, banyak cara yang dilakukan oleh para ilmuwan. Namun dalam penelitian ini, pengukurannya adalah dengan memakai model Sewell's Short Form of the Socio-economic Status Scale sebagaimana digunakan oleh Sutaryat Trisnamsyah dalam disertasinya (1984, h. 341), yaitu dengan melihat aspek-aspek : kepemilikan harta, kekayaan, kepemilikan benda budaya, dan partisipasi sosial. Model ini sedikit dimodifikasi dengan memperhatikan keadaan masyarakat yang dijadikan sasaran penelitian.

3. Nilai Budaya (NB)

Kehidupan manusia penuh dengan nilai-nilai. Sesuatu yang bernilai, berarti ia berharga atau mempunyai kele-

bahan yang dapat memberikan kepuasan atau kebahagiaan bagi seseorang. Di dalam kehidupan masyarakat, untuk mencapai keinginan mereka, ada nilai-nilai yang dipegang. Misalnya kalau ingin makmur, orang harus bekerja keras; atau kalau ingin hidup selamat, maka orang harus jujur dan tidak boleh menipu. Nilai-nilai itu begitu dipelihara, karena dipandang dapat membawa mereka kepada tujuan dalam hidup, seperti ketertiban dan keamanan, persaudaraan atau persatuan, dan lain sebagainya. Nilai dengan demikian menjadi pedoman tingkah laku. O'donnell dan Kable sehubungan dengan ini mengemukakan : "Values are measuring sticks by which we assess our behavior and obtain our goals. They are concepts of right and wrong, good and bad, true and false (1982, h. 26). Oleh karena nilai-nilai itu juga merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia, maka sering disebut sebagai nilai budaya.

Para antropolog, seperti Koentjaraningrat misalnya, memandang nilai budaya sebagai "konsepsi-konsepsi yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang amat bernilai dalam hidup" (1987, h. 25). Sedangkan seorang sosiolog, seperti Harsya W. Bachtiar misalnya, melihat nilai budaya sebagai sumber yang mengarahkan atau mengendalikan aktivitas manusia (1985, h. 2). Karena itulah dalam penelitian ini, diperkirakan bahwa nilai budaya yang hidup dalam suatu masyarakat akan ikut mempengaruhi bentuk respons yang diberikan. Pengukurannya dilakukan dengan melihat ketaatan seseorang di dalam melaksa-

nekan nilai-nilai/ajaran-ajaran agama, baik yang berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam; serta ketaatan di dalam melaksanakan norma-norma sosial yang berasal dari adat-istiadat masyarakat setempat. Pengukuran ini adalah sejalan dengan pendapat A. Mukti Ali (1987, h. 203) yang menyatakan bahwa di antara yang menjadi sumber utama nilai budaya masyarakat adalah agama dan adat (tradisi), di samping ideologi modern, ekonomi atau aspek sosial-budaya lainnya.

4. Umur (U)

Pada umumnya umur selalu diartikan secara kronologis berdasarkan perhitungan tahun, bulan dan hari. Cara ini memang adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan. Namun pada kata umur sesungguhnya mengandung pengertian yang lebih dari sekedar itu. Umur adalah kurun waktu, demikian pandangan Jose Ortega Y. Gasset seperti yang dikemukakan Daniel Dakidæ (Prisma No. 2, 1980, h. 5). Selama kurun waktu yang dilalui seseorang, ia akan mengalami perkembangan, baik secara fisiologis maupun psikis. Organ tubuh tumbuh berkembang dan bekerja menurut fungsinya, sehingga selama kurun waktu itu kita mengenal ada masa kanak-kanak, masa remaja, masa pemuda/dewasa, dan masa tua. Karena itulah pada kata umur yang sesungguhnya adalah keadaan organis dan fungsional (Alexis Carrel, 1987, h. 153).

Kemampuan fisik maupun tugas dan kewajiban yang harus diemban pada kurun waktu/umur itu tadi berbeda-beda adanya. Orang dewasa muda yang masih kuat, terdorong oleh

tugas dan kewajibannya mungkin akan lebih banyak keluar rumah untuk mencari nafkah, sementara yang sudah tua dengan keadaan fisik yang sudah melemah mungkin akan lebih banyak di rumah saja. Itulah sebabnya dalam penelitian ini diperkirakan ada pengaruh umur terhadap bentuk respons yang diberikan seseorang terhadap pengembangan obyek wisata pantai yang terjadi di sekelilingnya. Pengukuran umur seseorang di sini dilakukan dengan mengurangkan tahun sekarang (saat penelitian ini dilaksanakan) dengan tahun kelahirannya.

5. Pendidikan (P)

Pendidikan telah mengubah wajah kebudayaan manusia menjadi sedemikian maju. Itulah yang memang sekarang kita saksikan. Menurut W.P. Napitupulu (1983, h. 7), "pendidikan dapat dibatasi sebagai usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan". Batasan ini dapat terkena pada pendidikan formal (sistem persekolahan) atau bagi pendidikan luar sekolah. Pengertian pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.

Melalui pendidikan mula-mula manusia mengenal huruf dan angka, serta bisa membaca, menulis dan berbahasa. Selanjutnya pengetahuannya akan terus bertambah luas manakala pendidikannya meningkat. Dengan pengetahuan inilah seseorang menghadapi hidup dan penghidupannya, memahami dan beradaptasi dengan dunia sekelilingnya. Itulah sebabnya da-

lam penelitian ini, pendidikan yang dicapai seseorang diperkirakan mempengaruhi bentuk respons yang diberikannya terhadap pengembangan obyek wisata pantai yang terjadi di sekelilingnya. Pengukurannya adalah dengan melihat lama seseorang itu belajar di bangku sekolah dan pernah atau tidaknya mengikuti kegiatan belajar Pendidikan Luar Sekolah.

6. Pola Hubungan Sosial (PHS)

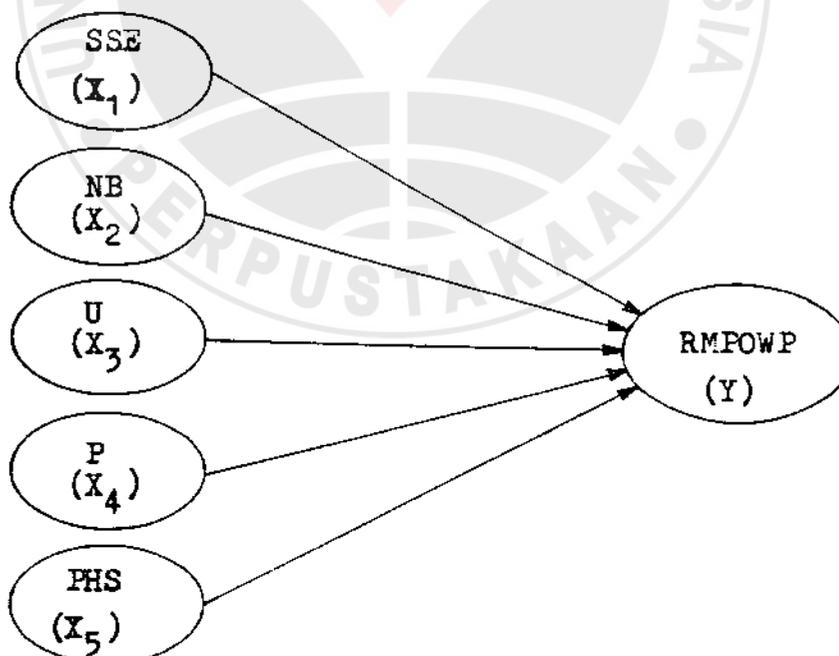
Manusia sebagai makhluk sosial selalu mengadakan hubungan sosial antara sesamanya. Hanya sejauhmana hubungan sosial itu dilakukan ada perbedaan antara individu yang satu dengan lainnya. Ada yang cukup dengan teman sekampung atau sedesanya, ada yang jauh melewati itu, yakni melampaui sistem sosialnya sendiri. Yang pertama disebut dengan lokalit, dan yang kedua disebut dengan kosmopolit. Rogers (1983, h. 259) menyatakan : "Cosmopolitness is the degree to which an individual is oriented outside the social system".

Dengan melakukan hubungan sosial itu pun pengetahuan seseorang dapat bertambah, sedikit-tidaknya secara informal. Di dalam proses hubungan sosial itu sesungguhnya terdapat banyak pelajaran dalam keadaan tak tertulis, sehingga semakin jauh seseorang melakukan hubungan sosial akan semakin banyak pengalaman yang hakekatnya merupakan pengetahuan sangat berharga bagi dirinya. Ada pepatah yang berbunyi : pengalaman adalah guru utama. Atas dasar pemikiran ini dalam penelitian ini juga diperkirakan pola atau bentuk hubungan sosial seseorang berpengaruh kepada bentuk

respons yang diberikannya terhadap pengembangan obyek wisata pantai yang terjadi di sekelilingnya. Pengukurannya dengan melihat apa yang biasanya dilakukan sehari-hari dalam hal hubungan sosial, apakah hanya berteman dengan sesama teman di kampung atau di desanya atautkah jauh melewati batas itu.

Kelima variabel terakhir di atas, yaitu status sosial ekonomi (SSE), nilai budaya (NB), umur (U), pendidikan (P), dan pola hubungan sosial (PHS) berkedudukan sebagai variabel independen karena diduga mempengaruhi respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai (RMPOWP) sebagai variabel dependen. Hubungan antar variabel ini secara grafis adalah sebagai berikut :

Gambar 2



Pola Hubungan Antar Variabel Penelitian

Pola hubungan antar variabel penelitian tersebut sekaligus merupakan paradigma dalam penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paradigma penelitian di atas, tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perbedaan respons masyarakat yang terjadi terhadap pengembangan obyek wisata pantai di Pulau Lombok, NTB serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Tujuan Khusus

Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui seberapa besar perbedaan respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai di Pulau Lombok, NTB.

b. Mengetahui hubungan status sosial ekonomi dengan perbedaan respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai di Pulau Lombok.

c. Mengetahui hubungan nilai budaya dengan perbedaan respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai di Pulau Lombok.

d. Mengetahui hubungan umur dengan perbedaan respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai di Pulau Lombok.

e. Mengetahui hubungan pendidikan dengan perbedaan respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai di Pulau Lombok.

f. Mengetahui hubungan pola hubungan sosial dengan

perbedaan respons masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata pantai di Pulau Lombok.

E. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang tergolong dewasa, laki-laki maupun perempuan, dengan dibatasi pada usia 15 - 64 tahun (usia angkatan kerja produktif), mempunyai pendidikan atau status sosial ekonomi rendah - tinggi, serta hidup dan tinggal berhadapan langsung dengan lokasi obyek-obyek wisata pantai tergolong telah berkembang (sebagaimana dikemukakan pada h. 10 - 11).

